



NO. Sertifikat 153.194/EKO/IX/2012

Sertifikat

DIBERIKAN KEPADA
Priadi Surya

SEBAGAI

PEMAKALAH

Seminar Nasional Pendidikan Teknik Elektro (SNPTE2012)

Dengan Tema:

**Strategi Menyongsong “Uji Kompetensi Awal” Guru Sekolah Menengah Kejuruan
yang diselenggarakan pada Hari Sabtu, 22 September 2012
di Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta**

Yogyakarta, 22 September 2012

Dekan FT UNY

Dr. Moch. Bruri Triyono
NIP. 19560216 198603 1 003

Ketua Panitia

Moh. Khairudin Ph.D.



PEMETAAN PENDIDIKAN VOKASI SEBAGAI PERTIMBANGAN PEMBUATAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN/KOTA

Priadi Surya
Universitas Negeri Yogyakarta
priadisurya@uny.ac.id

Abstrak

Pemetaan pendidikan (*education mapping*) merupakan pengembangan dari konsep pemetaan sekolah (*school mapping*). Makalah ini bertujuan untuk mengemukakan pemetaan pendidikan vokasi sebagai dasar pertimbangan pembuatan kebijakan untuk meningkatkan layanan pendidikan vokasi. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dan kajian hasil penelitian terkait. Temuan dalam studi ini adalah pemetaan vokasi berperan penting memberikan data dan informasi pendukung dalam perumusan kebijakan berbasis kewilayahan dan aspek-aspek yang terkait dengan layanan pendidikan vokasi khas kabupaten/kota setempat.

Kata kunci: pemetaan pendidikan, pemetaan sekolah, pendidikan vokasi, kebijakan pendidikan

PENDAHULUAN

Perumusan kebijakan pendidikan seyogianya berdasar kepada hasil-hasil penelitian yang mengungkap fakta kebutuhan di wilayahnya. Data yang diperoleh diolah untuk memberikan informasi yang sah bagi pembuat kebijakan. Harapannya kebijakan pendidikan yang digulirkan merupakan solusi bagi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat.

Data pendidikan yang diperoleh dari berbagai wilayah, dapat dituangkan dalam suatu peta pendidikan. Data yang ada dapat ditampilkan dalam bentuk tabel maupun gambar peta. Dari tabel dan peta inilah dapat kita ketahui persebaran kualitas pendidikan di suatu wilayah.

Pemerintah masih belum mengoptimalkan penelitian sebagai dasar perumusan kebijakan. Balitbangdikbud (2011) pun mengakuinya. *“Tidak bisa dipungkiri bahwa selama ini banyak kebijakan pendidikan yang kurang tepat sehingga sulit dalam pelaksanaannya. Salah satu sebab dari kondisi tersebut adalah kurang kuatnya suatu kebijakan yang dibuat atas dukungan hasil-hasil penelitian.”* Hal ini juga diutarakan Sofian Effendi (2011) bahwa *“Kebijakan pemerintah yang cenderung reaktif dan dirumuskan tidak untuk memecahkan masalah jangka panjang. Padahal Indonesia membutuhkan perubahan strategi pendidikan 20-30 tahun ke depan.”* Agaknya kebijakan pendidikan sebagai upaya memenuhi hak warga negara haruslah berdasarkan data, fakta, dan kebutuhan nyata di lapangan. Sungguh ideal pula jika kebijakan itu benar-benar berdasarkan kemandirian dan kemerdekaan bangsa Indonesia sendiri, tidak atas tekanan negara dan kepentingan asing.

Pemetaan pendidikan merupakan salah satu penyuplai informasi yang berguna bagi pembuatan keputusan. Gambaran nyata dari suatu kondisi di wilayah tertentu, menjadi titik tolak pembangunan pendidikan kita. Secara jangka panjang, kebijakan yang dihasilkan ditujukan untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, mutu, relevansi, kesetaraan, dan kepastian dalam memperoleh layanan pendidikan di Indonesia.

Betapapun sulitnya dan betapa mahalnyanya layanan pendidikan yang dapat menjangkau seluruh warga negara, pendidikan harus tetap dipandang sebagai kewajiban negara untuk memenuhinya. Kekhawatiran minimnya peran negara dalam penyediaan layanan pendidikan ini muncul pula dalam Hasil Rumusan dan Rekomendasi Kongres Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Tahun 2012 di Yogyakarta pada tanggal 7-8 Mei 2012.

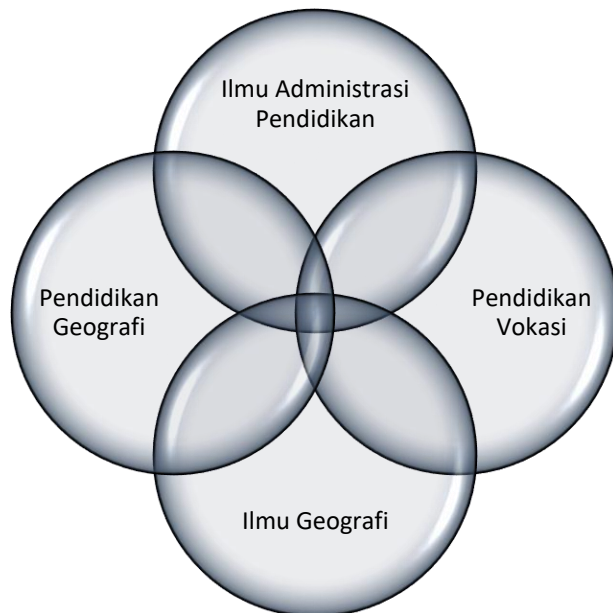
Pendidikan telah menjadi barang mewah, mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Pendidikan telah beralih dari public goods (kebutuhan publik yang menjadi tanggung jawab negara) ke private goods (kebutuhan pribadi), sehingga pendidikan telah berubah menjadi lahan bisnis. Pendidikan menjadi pencetak manusia yang dibutuhkan pasar dan ini pun gagal karena pasar ternyata tidak mampu menyerap mereka sehingga angka pengangguran selalu meningkat dari waktu ke waktu.

Penulis mengungkapkan gagasan sederhana mengenai pentingnya pemetaan pendidikan sebagai dasar untuk meningkatkan layanan pendidikan bagi warga negara. Penulis juga mengajak kita untuk berdiskusi dengan memandang administrasi pendidikan secara luas disumbang oleh berbagai ilmu lainnya.

PEMBAHASAN

Pemetaan Sekolah (*School Mapping*) dan Pemetaan Pendidikan Vokasi (*Vocational Education Mapping*) dalam Keilmuan Administrasi Pendidikan

Administrasi pendidikan dapat dipandang sebagai ilmu terapan yang disokong oleh ilmu-ilmu lain. Keterhubungan administrasi pendidikan dengan ilmu-ilmu lain dapat berupa *interdisciplinary science* ataupun *cross disciplinary science*. Pemetaan pendidikan yang berkembang dari konsep pemetaan sekolah (*school mapping*) merupakan keterhubungan administrasi pendidikan dengan ilmu geografi.



Gambar 1

Hubungan ilmu administrasi pendidikan dengan ilmu geografi dan ilmu-ilmu lainnya

Pemetaan sekolah adalah suatu kegiatan untuk memberikan gambaran atau mungkin secara rinci dan tepat di permukaan suatu daerah tertentu mengenai keadaan sekolah serta hubungannya dengan jumlah anak usia sekolah, perkembangan pemukiman penduduk, sosial ekonomi dan lingkungan dalam arti luas. Tujuan dari pemetaan sekolah antara lain menata jaringan sekolah, meningkatkan mutu pendidikan, dan perencanaan dalam menentukan lokasi sekolah. Contoh penerapan pemetaan sekolah misalnya dalam perencanaan menentukan lokasi sekolah yang strategis, merupakan langkah awal dalam menciptakan sekolah yang berkualitas. Letak suatu sekolah tentu akan berpengaruh pada kualitas. Kualitas sekolah dan output yang dihasilkan oleh sekolah harus memperhatikan aspek-aspek mudah dijangkau, jauh dari tempat yang ramai, tidak melebihi waktu lima belas menit atau 1,5 km perjalanan, cukup murid, dan tidak bertolak belakang dengan perkembangan pemikiran/primitif. (Sutiman, et al, 2012.; Tina Handriani, 2012).

Penulis mengembangkan konsep pemetaan pendidikan dari konsep pemetaan sekolah. Berbagai aspek pendidikan dalam ruang lingkup sekolah dibawa ke ranah yang lebih luas. Baik dalam hal ruang lingkup kajian maupun luasan wilayah yang dibahas. Pemetaan pendidikan ini mengadopsi dan mengadaptasi konsep pemetaan dari ilmu geografi.

Peta sebagai salah satu bidang kajian geografi digunakan sebagai sarana untuk mengetahui persebaran sesuatu hal dalam bidang pendidikan. Geografi yang dimaksud pun dapat berupa geografi fisik maupun sosial (nonfisik). Geografi fisik dapat digunakan dalam keperluan sistem fasilitas pendidikan. Sistem fasilitas pendidikan bertujuan untuk menyediakan lingkungan fisik yang dapat membantu tercapainya keberhasilan individu dalam proses pembelajaran. (Banghart dan Trull, 1973). Hal ini contohnya dapat digunakan ketika kita hendak menentukan lokasi pendirian sekolah. Geografi sosial dapat digunakan dalam keperluan sistem aktivitas pendidikan, sistem komunikasi pendidikan, dan sistem operasional pendidikan. Contohnya seperti pemetaan tenaga pendidik di suatu wilayah.

Terdapat konsep esensial dan prinsip geografi yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pemetaan pendidikan. Geografi pada hakikatnya merupakan studi tentang gejala-gejala yang nyata dalam kehidupan manusia. Gejala geografi yang ada di sekitar kita merupakan hasil keseluruhan interelasi keruangan antara faktor fisis dan nonfisis. Dalam mempelajari geografi terdapat pola nyata dan abstrak. Pola abstrak dalam bentuk pengertian abstraksi disebut konsep. (Gatot Harmanto, 2008: 6).

Konsep esensial geografi meliputi konsep lokasi, konsep jarak, konsep keterjangkauan, konsep pola, konsep morfologi, konsep aglomerasi, konsep nilai kegunaan, konsep interaksi, konsep diferensiasi areal, dan konsep keterkaitan ruangan. Adapun prinsip geografi merupakan dasar mengkaji dan mengungkapkan gejala masalah geografi di permukaan bumi. Secara teoritis prinsip geografi terdiri dari prinsip penyebaran, prinsip interelasi, prinsip deskripsi, dan prinsip korologi. (Gatot Harmanto, 2008: 7).

Pemetaan Pendidikan Sebagai Dasar Meningkatkan Layanan Pendidikan Vokasi

Pembuatan kebijakan pendidikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat luas memerlukan suatu dasar acuan yang jelas. Pemetaan pendidikan dimaksudkan sebagai kondisi nyata yang harus diperbaiki oleh pemegang kebijakan. Memperhatikan konsep perencanaan pendidikan komprehensif dari Banghart dan Trull (1973) paling sedikit ada empat sistem yang mendukung perencanaan pendidikan yang pada gilirannya akan dituangkan sebagai kebijakan. Sistem tersebut meliputi sistem aktivitas pendidikan, sistem komunikasi pendidikan, sistem fasilitas pendidikan, dan sistem operasional pendidikan.

Pemetaan pendidikan dapat dijadikan dasar perencanaan pendidikan. Peran pemetaan sekolah sebagai dasar meningkatkan layanan pendidikan ini juga dikemukakan oleh Departemen Pendidikan Filipina (2012) "*School mapping*

is a set of techniques and procedures used to plan the demand for schools at the local level and to support decision-making on the planning, policy formulation, resource allocation and prioritization of future school development.” Jelaslah bahwa pemetaan pendidikan ini dapat digunakan pemegang kebijakan, terlebih-lebih pemerintah daerah, sebagai pendukung pembuatan keputusan dalam perencanaan, perumusan kebijakan, pengalokasian sumber daya, dan pengutamakan pengembangan sekolah untuk masa depan.

Sebagai bagian dari perencanaan pendidikan, pemetaan sekolah dapat dipandang pula sebagai metode perencanaan pendidikan secara mikro yang berupa proses penataan atau penataan kembali jaringan persekolahan yang ada sehingga diperoleh jaringan yang baru dengan daya tampung yang lebih besar. Sumber-sumber yang ada dapat didayagunakan secara optimal. Selanjutnya diusahakan agar mutu pendidikan yang lebih berbobot dan mempunyai relevansi dengan pembangunan. (Sutiman, et al., 2012).

Setidaknya ada sepuluh bidang garapan manajemen pendidikan yang dapat memanfaatkan pemetaan pendidikan sebagai inputnya. Bidang garapan itu meliputi organisasi lembaga pendidikan, manajemen kurikulum, manajemen peserta didik, manajemen personalia pendidikan, manajemen fasilitas pendidikan, manajemen pembiayaan pendidikan, manajemen hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat, ketatalaksanaan lembaga pendidikan, kepemimpinan pendidikan dan supervisi pendidikan.

Gagasan penulis nampak senada dengan Steven J. Hite (2008: 5) mengenai penerapan pemetaan sekolah, “A typical methodology in implementing a SM (School Mapping) process would include steps and considerations like the following:

1. The selection of a unit or unit of analysis for the SM exercise.
2. A diagnosis of the existing educational situation in the base year.
 - a. Existing inequalities in access by impacted area(s) and group(s).
 - b. Efficiency issues such as repetition and drop-out rates (wastage).
 - c. Disparities in elements impacting quality such as facilities, teachers, equipment and supplies.
3. Detailed projection of enrolment demand potential, including definitions of optimal catchment area(s) for the school(s).
4. Estimation of numbers and identification of locations where schools are to be opened (and perhaps closed).
 - a. Teacher transfers and distribution.
 - b. School calendar modifications to increase student participation.
 - c. Measures to encourage attendance such as school meals and free school book programmes.
5. Estimation of facilities, resources and supplies to be provided in schools.
6. Cost estimations

Mengambil konteks Indonesia, penulis berkeyakinan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dapat mengambil tindakan dengan memanfaatkan konsep-konsep pemetaan pendidikan ini. Pemetaan pendidikan ini berperan dalam penyediaan data dan pendukung pembuatan keputusan.



Diagram 1
Pemetaan Distribusi Guru Indonesia 2008
Sumber: BPSDMP-PMP Kemdikbud (2011)

Contoh dari pemetaan pendidikan di Indonesia misalnya, menggambarkan distribusi guru yang sangat timpang, sebagian besar masih terkonsentrasi di daerah perkotaan. Baik di kota (52%) maupun perdesaan (68%) mengalami kelebihan guru. Mayoritas sekolah di wilayah terpencil (66%) kekurangan guru. Tantangan yang dihadapi pemerintah adalah meningkatkan pemerataan distribusi guru. Kebijakan pemerintah yang kemudian menindaklanjuti masalah ini adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menandatangani SKB 5 Menteri bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama. SKB ini berisi kesepakatan untuk kerjasama dan memberikan dukungan dalam hal pemantauan, evaluasi, dan kebijakan penataan

serta pemerataan guru secara nasional. Contoh ini menunjukkan bahwa pemetaan pendidikan sungguh dapat menjadi dasar untuk meningkatkan pelayanan pendidikan.

Model Perkuliahan “Kajian Mandiri *School Mapping*”

Model perkuliahan “Kajian Mandiri *School Mapping*” diterapkan pada mahasiswa Program Studi S1 Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta Angkatan 2009 Kelas A Semester Gasal Tahun Akademik 2011/2012 melalui mata kuliah dasar kependidikan Manajemen Pendidikan (MDK 221) dengan dosen pengampu Priadi Surya, M.Pd dari Jurusan Administrasi Pendidikan FIP UNY.

Pada awal perkuliahan, penulis sebagai dosen pengampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa bahwa keilmuan manajemen pendidikan merupakan ilmu terapan yang disokong oleh ilmu-ilmu lainnya termasuk geografi dan pendidikan geografi.

Penulis berasumsi bahwa mahasiswa Pendidikan Geografi semester lima sudah memiliki kompetensi dasar maupun lanjut mengenai ilmu geografi dan pendidikan geografi. Penulis memanfaatkan potensi itu untuk menghubungkannya dengan ilmu administrasi pendidikan dalam perkuliahan Manajemen Pendidikan.

Desain perkuliahan MDK 221 Manajemen Pendidikan pada Pendidikan Geografi dirancang dengan metode ceramah, presentasi kelompok dan diskusi kelas dengan tema-tema yang sudah dibagi, serta tugas individu dalam hal ini makalah “Kajian Mandiri *School Mapping*”. Mahasiswa diberi tahu pada awal perkuliahan mengenai tugas individu ini harus dikumpulkan di pertemuan/tatap muka perkuliahan terakhir.

Penjelasan tentang *school mapping* diberikan di awal-awal perkuliahan. Meskipun memakai istilah *school mapping* yang artinya pemetaan sekolah, namun sesungguhnya pembahasan pemetaan ini tidak terbatas kepada sekolah saja. Oleh karena penulis mengusulkan gagasan *education mapping* atau pemetaan pendidikan. Adapun isi atau materi apa yang hendak dipetakan dipelajari bersama seiring berjalannya presentasi kelompok dan diskusi kelas. Sejak awal perkuliahan hingga batas waktu pengumpulan tugas individu “Kajian Mandiri *School Mapping*”, mahasiswa diperkenankan untuk berkonsultasi dengan dosen pengampu.

Pada waktu pengumpulan tugas “Kajian Mandiri *School Mapping*” yang telah ditentukan, mahasiswa mengumpulkan tugasnya sebagai salah satu unsur penilaian selain ujian tengah semester dan ujian akhir semester. “Kajian Mandiri *School Mapping*” karya mahasiswa tersebut terdiri dari beragam aspek geografi dan administrasi pendidikan. (lihat Tabel 1).

Tabel 1

Beberapa “Kajian Mandiri *School Mapping*” Bertema Pendidikan Vokasi Mahasiswa Program Studi S1 Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta Angkatan 2009 Kelas A Semester Gasal Tahun Akademik 2011/2012

No.	Nama Mahasiswa & Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Hermawan Kuswantoko <i>Perencanaan Sekolah Penerbangan di Kabupaten Kulon Progo</i>	Perencanaan sekolah penerbangan di Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dipandang tepat karena akan menjadi lokasi dibangunnya bandar udara internasional. Masyarakat sekitar lokasi ini dapat menjadi peserta didik dari sekolah penerbangan di daerahnya, dan bekerja di bandara ini.
2	Nurul Khassanah Kurnia Putri <i>Polemik Sekolah yang Menyandang Status RSBI pada Tingkat SMA dan SMK di Provinsi Jambi</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. RSBI SMKN 3 Jambi terjerat kasus korupsi. 2. SMAN 1 Jambi dan SMAN 3 Kota Jambi yang berstatus RSBI terancam dicabut. 3. Setelah dua tahun menyandang RSBI, belum terdapat perubahan baik dalam pembangunan sekolah, penyediaan sarana dan prasarana maupun pembinaan terhadap guru.
3	Rizky Mandasari <i>Peningkatan Minat terhadap SMK di Bidang Perikanan dan Pelayaran</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMK perikanan dan pelayaran dapat mengurangi pengangguran karena menyiapkan siswanya untuk kerja. 2. SMK perikanan dan pelayaran dapat meningkatkan perekonomian di daerah maritim dengan melaksanakan praktikum ataupun penjualan makanan di dekat sekolah. 3. Untuk meningkatkan minat terhadap SMK perikanan dan pelayaran harus dilakukan hal-hal berikut. <i>Pertama</i>, meningkatkan aksesibilitas menuju sekolah dan tempat praktikum. <i>Kedua</i>, meningkatkan jumlah transportasi menuju sekolah. <i>Ketiga</i>, menyediakan

beasiswa bagi siswa berprestasi serta kurang mampu. *Keempat*, menerapkan sistem pencarian kerja oleh sekolah agar nantinya siswa sudah terarah ke mana ia bekerja. *Kelima*, menyediakan asrama bagi siswa yang rumahnya sangat jauh dari sekolah.

- | | | |
|---|---|--|
| 4 | Faqih Shofan Mufti
<i>Pemetaan Sistem Pendidikan terhadap Prospek Dunia Kerja di SMKN 1 Wanareja Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi SMKN 1 Wanareja belum memiliki standar yang baik dalam hal peningkatan pembelajaran. 2. SMKN 1 Wanareja masih belum memadai dalam hal sarana prasarana. Tempat parkir belum sepadan dengan jumlah kendaraan. Belum tersedianya kantin sekolah. Perpustakaan belum memiliki koleksi buku baru. |
| 5 | Sumarti
<i>Pengaruh Lokasi Strategis untuk Pembangunan SMK Guna Meningkatkan Mutu Pendidikan dan Mengurangi Angka Pengangguran Penduduk di Perdesaan</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi yang dipilih untuk pembangunan sekolah di perdesaan harus berada di perdesaan yang mudah untuk dijangkau, persediaan airnya mencukupi dan mempunyai tanah yang luas. 2. Faktor-faktor pendukung pembangunan SMK di perdesaan adalah berikut ini. <i>Pertama</i>, meningkatnya migrasi yang terjadi di perdesaan. <i>Kedua</i>, kurangnya pengetahuan dan jiwa <i>skill</i> yang dimiliki oleh generasi muda. <i>Ketiga</i>, banyaknya sumber daya alam yang tidak dimanfaatkan oleh penduduk perdesaan. <i>Keempat</i>, faktor lokasi. <i>Kelima</i>, meningkatkan aksesibilitas. 3. Manfaat pembangunan SMK di perdesaan, yaitu <i>pertama</i>, siswa dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh pada saat menuntut ilmu pendidikan dan secara langsung dapat membuktikannya dalam kehidupan masyarakat. <i>Kedua</i>, siswa yang sudah selesai masa pendidikan di sekolahnya dapat langsung memiliki pekerjaan. <i>Ketiga</i>, menambah pengetahuan masyarakat akan kemajuan teknologi yang ada di desa. <i>Keempat</i>, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. |
| 6 | Murika Wulandari
<i>Peta Sekolah SMK Negeri 1 Pandak Bantul Berdasarkan Peninjauan terhadap Analisis Permasalahan Belajar Siswa</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi sekolah berada di daerah bergunung-gunung mengakibatkan aksesibilitas menuju sekolah ini relatif sulit. 2. Aksesibilitas yang relatif sulit menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan belajar siswa. 3. Permasalahan belajar yang dialami sebagian besar berkisar tentang masalah prestasi belajar, dan yang lainnya adalah tingginya kehamilan di luar nikah. |
| 6 | Fajar Agung Nugroho
<i>Pemetaan Sekolah dalam Perencanaan Model Sekolah Vokasi Berbasis Potensi Lokal di Daerah Pesisir Bantul</i> | Mayoritas pendidikan terakhir penduduk daerah pesisir adalah SMP. Perlu dilanjutkan bisa langsung ke SMK karena mendapat praktik lapangan dan dikhususkan kerja yang berhubungan dengan daerah asal berpotensi alam laut. |
| 7 | Dede Setyowati
<i>SMK Pertanian Sebagai Salah Satu Upaya Memaksimalkan Pendayagunaan Penggerak Ekonomi</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor penyebab minimnya SMK pertanian di Kulon Progo adalah berikut, <i>Pertama</i>, kondisi geografis Kabupaten Kulon Progo yang berbukit-bukit. Sebaran penduduk dan pusat pertumbuhan yang berpecah. <i>Kedua</i>, minimnya tenaga kependidikan dalam bidang pertanian. <i>Ketiga</i>, sedikitnya peminat untuk memasuki SMK pertanian. |

- Kerakyatan di Kulon Progo*
2. Solusi untuk mengembangkan SMK pertanian di Kulon Progo dilakukan dengan cara berikut. *Pertama*, peminat SMK pertanian diberikan beasiswa. *Kedua*, memperbanyak SMK pertanian di Kabupaten Kulon Progo.
 3. Prediksi SMK pertanian di masa depan adalah berpengaruh positif terhadap pertanian di Kulon Progo.
- 8 Wahyu Mardiyanto
Optimalisasi SMK Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Purworejo
1. Faktor-faktor pendorong didirikannya SMK kelautan dan perikanan di Kabupaten Purworejo adalah, *pertama*, kondisi geografis yang berbatasan dengan Samudera Hindia di bagian selatan. *Kedua*, belum adanya SMK kelautan dan perikanan di Kabupaten Purworejo.
 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi sedikitnya peminat SMK kelautan dan perikanan di Kabupaten Purworejo adalah *pertama*, kalah populer dengan SMA. *Kedua*, biaya pendidikan di SMK relatif lebih mahal. *Ketiga*, kurangnya sosialisasi dari pemerintah maupun sekolah. *Keempat*, sarana dan prasarana yang masih kurang.
 3. Upaya untuk mengembangkan SMK kelautan dan perikanan di Kabupaten Purworejo adalah berikut, *pertama*, memberikan fasilitas yang lengkap guna menunjang proses pembelajaran. *Kedua*, adanya sosialisasi dari pemerintah maupun pihak sekolah tentang kelebihan dari SMK kelautan dan perikanan. *Ketiga*, pemberian beasiswa kepada siswa berprestasi. *Keempat*, adanya penyaluran kerja setelah lulus dari sekolah kelautan dan perikanan.
 4. Menambah SMK kelautan dan perikanan di Kabupaten Purworejo.
-

Hasil kajian mandiri mandiri mahasiswa umumnya sudah memenuhi ruang lingkup kajian pemetaan pendidikan. Mereka sudah mampu mendeskripsikan konsep-konsep dasar dari beberapa disiplin ilmu penunjangnya. Hasil penelitian menunjukkan banyaknya analisis mahasiswa yang dapat dipertimbangkan dalam rangka pemecahan masalah pendidikan untuk penguatan manajemen pendidikan nasional untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, mutu, relevansi, kesetaraan, dan kepastian dalam memperoleh layanan pendidikan vokasi di Indonesia.

Mahasiswa telah melakukan kajian pemetaan pendidikan vokasi dengan berbagai metode penelitian di antaranya kajian pustaka, studi dokumentasi, dan observasi. Beberapa balikan yang disampaikan mahasiswa selama perkuliahan terkait *school mapping* ini, di antaranya adalah sangat minimnya literatur yang tersedia. Meski pada awal perkuliahan, dosen sudah memberikan daftar referensi yang dapat dijadikan rujukan termasuk dari internet. Kiranya memang masih perlu dikembangkan lebih lanjut kajian pemetaan pendidikan ini sebagai salah satu fokus studi administrasi pendidikan.

PENUTUP

Pemetaan pendidikan (*education mapping*) merupakan pengembangan dari konsep pemetaan sekolah (*school mapping*). Pemetaan pendidikan vokasi sebagai dasar pertimbangan pembuatan kebijakan diarahkan untuk meningkatkan layanan pendidikan vokasi. Pemetaan pendidikan vokasi berperan penting memberikan data dan informasi pendukung dalam perumusan kebijakan berbasis kewilayahan dan aspek-aspek yang terkait dengan layanan pendidikan vokasi. Pemetaan pendidikan vokasi memerlukan sumbangan ilmu lain, khususnya geografi dalam keilmuan administrasi pendidikan.

Daftar Pustaka

Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2011). "Jaringan Penelitian Pendidikan." <http://litbang.kemdikbud.go.id/detail.php?id=4> diakses 17 Mei 2012 pukul 9.52 WIB.

Banghart, F.W & Trull. (1973). *Educational Planning*. New York: Macmillan Company

Department of Education. (2012). *Overview of School Mapping*. MS. Powerpoint. <http://deped-pfsed.wikispaces.com/School+Mapping> diakses 25 Mei 2012 pukul 15.23 WIB.

- Effendi, Sofian. (2011). Wawancara dalam artikel "Kebijakan Pendidikan Tak Berdasar Riset." Senin, 24-Oct-2011 07:51:28 <http://litbang.kemdikbud.go.id/detail.php?Kebijakan-Pendidikan-Tak-Berdasar&id=251> diakses 17 Mei 2012 pukul 9.59 WIB.
- Handriani, Tina. (2012). *Penentuan Lokasi dalam Pembangunan Sekolah Serta Evaluasi Letak Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Ngawi*. Makalah Manajemen Pendidikan Jurusan Pendidikan Geografi FIS UNY.
- Harmanto, Gatot. (2008). *1700 Bank Soal Bimbingan Pemantapan Geografi untuk SMA/MA: Ringkasan Materi X, XI, dan XII*. Bandung: Yrama Widya.
- Hasil Rumusan dan Rekomendasi Kongres Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Tahun 2012. Yogyakarta, 7-8 Mei 2012.
- Hite, Steven J. (2008). *School Mapping and GIS in Education Micro-planning*. Paris: International Institute for Educational Planning
- BPSDMP-PMP Kemdikbud. (2011). *Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Guru*. Paparan power point pada Teacher Education Summit. Jakarta, 14 Desember 2011.
- Sutiman, et al. (2012). *Pemetaan Sekolah*. Diktat kuliah. Yogyakarta: Jurusan Administrasi Pendidikan FIP UNY.